



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 16.575.063.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 16.575.063.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo Rahadian Muzhar
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.838.178.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.838.178.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum


Cahyo Rahadian Muzhar
NIP. 196909181994031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

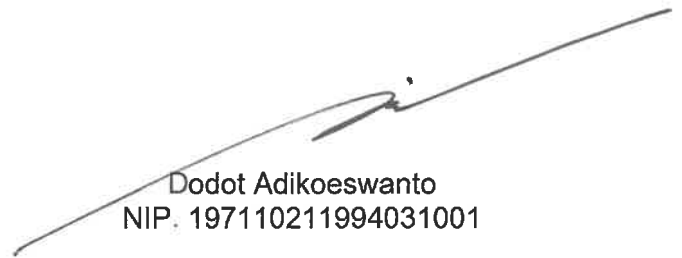
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332


Dodot Adikoeswanto
NIP.197110211994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 Orang
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	luar lembaga di wilayah sesuai standar	3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas)	0 UPT
		2. Jumlah UPT Pembangunan Rumah Tahanan Negara (Rutan)	0 UPT
		3. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP)	0 UPT
		4. Jumlah UPT Pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	0 UPT
		5. Jumlah UPT Pembangunan Balai Pemasarakatan (Bapas)	0 UPT
		6. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	1 UPT
10.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Dokumen
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Dokumen
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Dokumen
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Dokumen
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4 Unit

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	155 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9.900 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 UPT

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 98.831.580.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 98.831.580.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 175.128.889.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 175.128.889.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan


Reynhard Silitonga
NRP. 67090332

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP.197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Silmy Karim

Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Silmy Karim

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
2.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,14 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 7.931.557.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 7.931.557.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 80.510.494.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 80.510.494.000,-

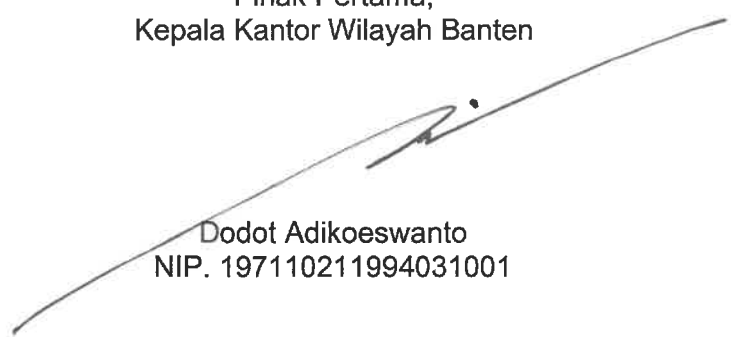
Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Imigrasi



Silmy Karim

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Min Usihen
NIP 196903091994032001

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	1. Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.374.578.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.374.578.000,-

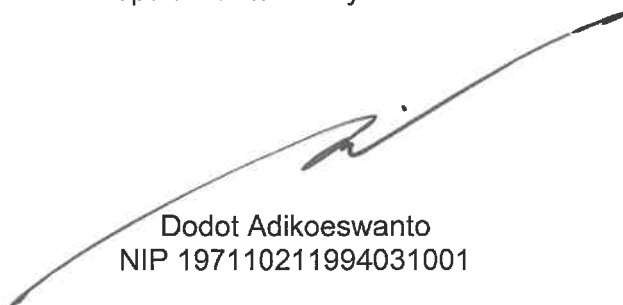
Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Min Usihen
NIP 196903091994032001



Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
2.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 498.635.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 498.635.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana
NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

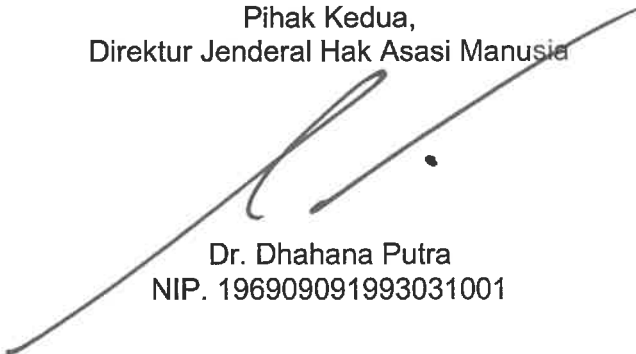
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 251.447.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 251.447.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

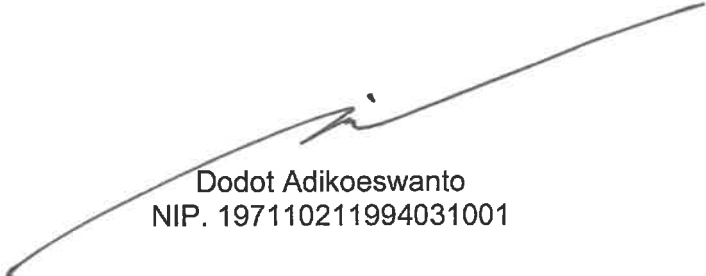
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo Ekatjahjana
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

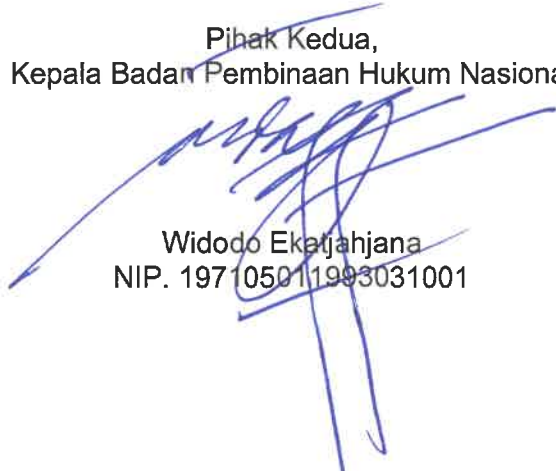
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan
2.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
3.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
4.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 138.004.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 138.004.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.257.962.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp 2.257.962.000,-

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Widodo Ekatjahjana
NIP. 197105011993031001


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

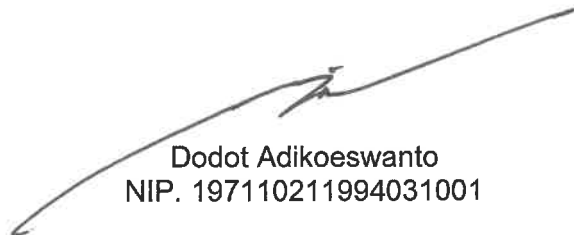
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoewanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 249.259.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp 249.259.000,-

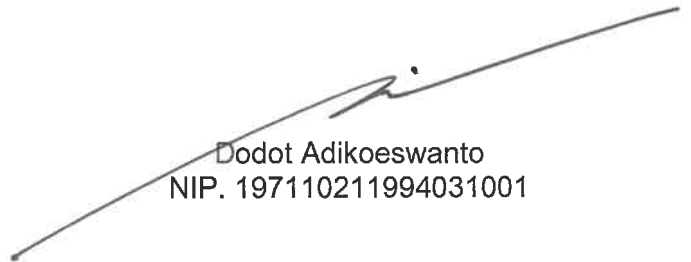
Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan HAM



Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dodot Adikoeswanto

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah Rahmanawati
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001


Nur Azizah Rahmanawati
NIP. 197803022003122002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

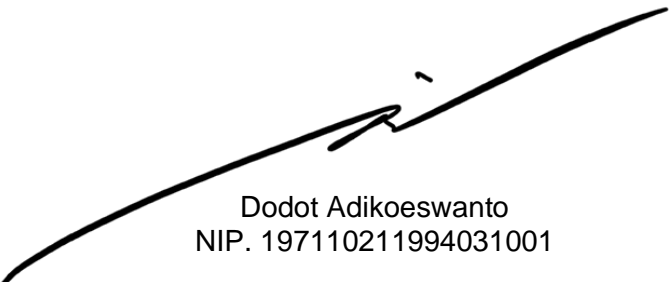
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.575.063.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 16.575.063.000,-

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001


Nur Azizah Rahmanawati
NIP. 197803022003122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Azizah Rahmanawati

Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 10 Januari 2024

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah
Banten

Nur Azizah Rahmanawati
NIP. 197803022003122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jalu Yuswa Panjang
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Jalu Yuswa Panjang
NIP. 197312221998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	83 Indeks
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
5.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100 %
6.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %

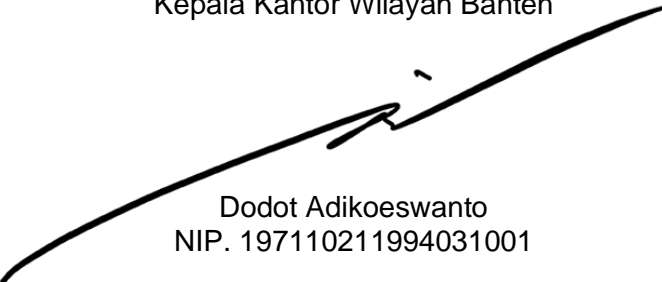
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %
9.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan dan Kapasitas Hunian	1. Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan	1 UPT

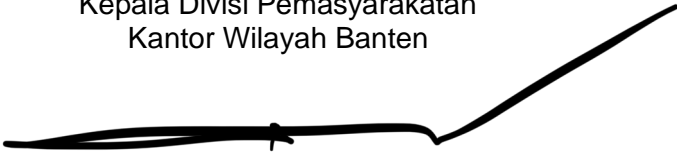
Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 896.956.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 896.956.000,-

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pemasarakatan
Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001


Jalu Yuswa Panjang
NIP. 197312221998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jalu Yuswa Panjang

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 10 Januari 2024

Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Banten

Jalu Yuswa Panjang
NIP. 197312221998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meidy Firmansyah
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

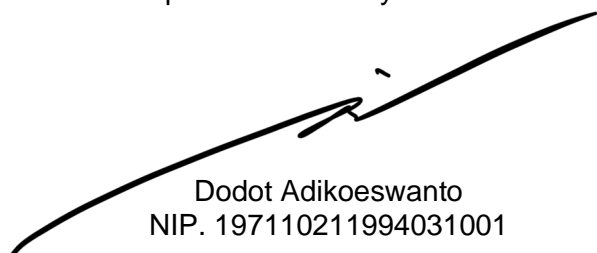
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

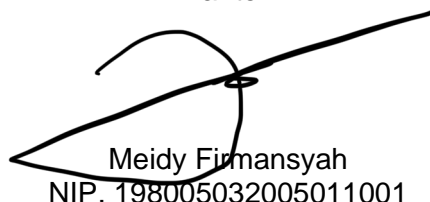
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Banten


Meidy Firmansyah
NIP. 198005032005011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
2.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
3.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
4.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %
5.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
6.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang
7.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
8.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
9.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan

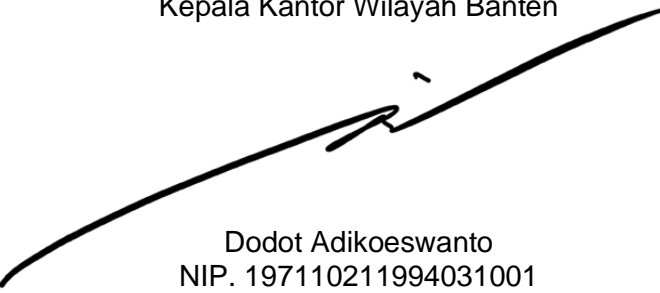
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
11.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
12.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
13.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 7.470.718.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Rp. 2.838.178.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.374.578.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 2.257.962.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 636.639.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp. 498.635.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 138.004.000,-
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 251.447.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 251.447.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 249.259.000,-
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 249.259.000,-

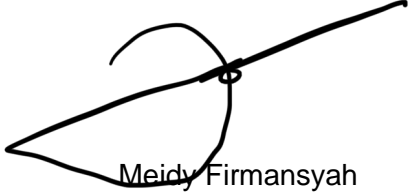
Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Banten



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001



Meidy Firmansyah
NIP. 198005032005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meidy Firmansyah

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 10 Januari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Banten

Meidy Firmansyah
NIP. 198005032005011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akram
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Banten

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dodot Adikoeswanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Banten

Muhammad Akram
NIP. 197403201999031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.447.456.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.447.456.000,-

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Banten

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Banten

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Muhammad Akram
NIP. 197403201999031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Akram

Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Banten

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Serang, 10 Januari 2024

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah
Banten

Muhammad Akram
NIP. 197403201999031001